

PARTISIPASI TOKOH MASYARAKAT MELALUI FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DALAM PILKADA 2024 DI KOTA PONTIANAK

Febea Dewanti Heidyanti

NPP. 32.0691

Asdaf. Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email : 32.0691@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Andi Pitono, S.Sos., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focus on the government's monitor and maintaining social stability within the community. A heightened awareness of potential conflicts must be a particular focus for the government to ensure smooth governance, especially in supporting the successful implementation of the 2024 regional elections (Pilkada) in Pontianak. Kesbangpol (Agency for National Unity and Politics) is a government body responsible for assisting local governments in managing national unity and political affairs. Based on the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 46 of 2019 on Early Vigilance in Regions, FKDM (Forum for Early Detection of Community Conflict) operates under Kesbangpol to detect and prevent potential conflicts within society. **Purpose:** This study aims to observe and analyze the participation of FKDM members in conducting political outreach as a form of early vigilance ahead of the 2024 Pilkada. **Method:** A descriptive qualitative method was used in this research. **Result:** The results indicate that FKDM members have implemented various political outreach programs to reduce the potential for conflict during the election process in Pontianak. The Kesbangpol Agency of Pontianak City provides facilities, infrastructure, and program support in the form of outreach and dialogue to help prevent conflict. **Conclusion:** The successful execution of the Pilkada is crucial to achieving democratic goals. The Kesbangpol Agency cannot operate alone; synergy with all elements of society and other regional government units in Pontianak is necessary for preventive efforts to minimize potential conflict. However, challenges remain, particularly in the area of technology monitoring, which hinders the supervision of hoax dissemination within the community.

Keywords: Community Participation, Social Conflict, FKDM

ABSTRAK

Problem Statement/Background (GAP): Fokus penulis adalah pengawasan pemerintah dan menjaga stabilitas sosial di masyarakat. Peningkatan kewaspadaan terhadap potensi konflik harus menjadi fokus khusus bagi pemerintah untuk memastikan kelancaran tata kelola pemerintahan, terutama dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Umum Daerah (Pilkada) 2024 di Pontianak. Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) merupakan lembaga pemerintah yang bertugas membantu pemerintah daerah dalam mengelola persatuan dan kesatuan bangsa serta urusan politik. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, FKDM (Forum Deteksi Dini Konflik Masyarakat) berada di bawah Kesbangpol untuk mendeteksi

dan mencegah potensi konflik di masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengamati dan menganalisis partisipasi anggota FKDM dalam melakukan sosialisasi politik sebagai bentuk kewaspadaan dini menjelang Pilkada 2024. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota FKDM telah melaksanakan berbagai program sosialisasi politik untuk mengurangi potensi konflik selama proses pemilihan umum di Pontianak. Badan Kesbangpol Kota Pontianak menyediakan sarana, prasarana, dan dukungan program berupa sosialisasi dan dialog untuk membantu mencegah konflik. **Kesimpulan:** Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada sangat penting untuk mencapai tujuan demokrasi. Badan Kesbangpol tidak dapat bekerja sendiri, sinergi dengan seluruh elemen masyarakat dan satuan kerja perangkat daerah lainnya di Pontianak diperlukan untuk upaya preventif guna meminimalisir potensi konflik. Namun demikian, masih terdapat kendala terutama pada aspek pengawasan teknologi yang menghambat pengawasan penyebaran berita bohong di tengah masyarakat.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Konflik Sosial, FKDM

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kewaspadaan dini dalam konteks Pilkada merujuk pada kemampuan masyarakat untuk mengenali, menganalisis, dan merespons potensi gangguan atau masalah yang dapat muncul selama proses pemilihan. Hal ini meliputi kewaspadaan terhadap manipulasi politik, penyebaran hoaks atau informasi palsu, praktik politik uang, kekerasan, serta potensi konflik antar pendukung calon yang dapat memicu ketegangan sosial. Keberhasilan pelaksanaan Pilkada sangat bergantung pada seberapa baik masyarakat dapat menghadapi dan mengatasi masalah-masalah ini dengan sikap yang bijak dan konstruktif. Meskipun penyelenggaraan Pilkada di Indonesia telah diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan yang demokratis, sering kali masyarakat menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga integritas proses pemilihan.

Kota Pontianak merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki keberagaman suku, budaya dan agama. Masyarakat yang majemuk ini dianggap sebagai kekayaan bangsa, di saat keadaan tertentu dapat memberikan kontribusi positif dalam persaingan secara sehat. Namun, dalam keadaan lainnya, masyarakat majemuk tidak hanya dipandang sebagai perbedaan belaka, tetapi sebagai suatu pertentangan atau konflik di tengah-tengah masyarakat ([Kamal, 2013](#)). Keberagaman sering kali membawa tantangan tersendiri, termasuk potensi konflik yang dapat muncul akibat perbedaan pandangan, nilai, dan kepentingan. Kericuhan pernah terjadi di Kota Pontianak pada Pemilu tahun 2019 lalu. Aksi anarkisme & pembakaran Pos Polisi Lalu Lintas terjadi di simpang Jl. Tanjung Raya Kec. Pontianak Timur dan Pos Polisi Lalu Lintas di simpang Hotel Garuda Jl. Tanjung Pura Kec. Pontianak Selatan dalam hal penolakan terhadap penetapan pemenang pemilihan Presiden/Wakil Presiden periode 2019-2024 oleh KPU Pusat. Kericuhan diduga akibat masyarakat terpancing dengan aksi provokasi “kebencian” oleh oknum kelompok di beberapa wilayah yang tidak mendukung calon Presiden terpilih, kemudian memunculkan kerumunan massa dan harus ditangani pihak berwajib untuk menenangkan kondisi ricuh tersebut. Akibat dari kericuhan pada tahun 2019 lalu Kota Pontianak menutup akses beberapa jalur dan membatasi akses jalan tol, himbauan pembatasan aktivitas di luar rumah sehingga hal tersebut sangat merugikan masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah menetapkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM yang merupakan wadah bagi elemen masyarakat, dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.

Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di kabupaten/kota menjadi tanggung

jawab pemerintah. Tujuan utama dibentuk pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat sehingga bisa menjalankan kehidupan secara wajar (Supandi et al., 2023). Keanggotaan FKDM kabupaten/kota terdiri atas wakil-wakil ormas, perguruan tinggi, lembaga pendidikan selain, tokoh masyarakat (tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda) dan elemen masyarakat lainnya. FKDM merupakan bagian yang penting di masyarakat. Mengingat Kota Pontianak adalah kota multikultural, sehingga potensi ancaman untuk menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang damai sangat mungkin terjadi. Pendeteksian secara dini di lingkungan masyarakat dapat mengantisipasi ancaman konflik. FKDM sebagai komunikator politik dapat sepenuhnya menjangkau seluruh daerah rawan gangguan dengan menyelenggarakan kewaspadaan dini untuk mencegah timbulnya konflik yang dapat mengganggu stabilitas sosial politik di Kota Pontianak dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terjadinya konflik dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 lalu hingga membuat situasi sosial mencekam di Kota Pontianak dan beragamnya ras dan suku di Kota Pontianak membuat pemerintah harus terus mengevaluasi dan mengantisipasi segala bentuk ancaman sosial yang dapat terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tentunya hal ini akan mengancam ketenteraman dan ketertiban umum seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum. Kewaspadaan dini tidak hanya menjadi tugas bagi TNI, Polri ataupun Satpol PP saja. Namun, untuk mencegah segala bentuk ancaman sosial khususnya dalam pelaksanaan Pilkada di kota Pontianak, pemerintah perlu melakukan pencegahan dan kewaspadaan dini. Deteksi dini dilakukan untuk menghindari munculnya konflik, mengantisipasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, meningkatkan stabilitas sosial, dan memperkuat koordinasi antar pemangku kebijakan dan masyarakat di daerah.

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat menjadi suatu forum yang dibentuk oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. Keterlibatan partisipasi masyarakat di dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat diharapkan, dapat membantu pemerintah daerah dalam melakukan deteksi dini serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi konflik sosial. Konflik menurut Gyberg dalam (Koubar & Haji, 2025) disebabkan karena adanya hambatan dalam memahami dan dapat mengubah ketegangan suasana ketika terjadi perpecahan antara masyarakat dan kelompok tertentu. Forum ini menjadi wadah berbagai elemen masyarakat untuk berkontribusi dalam upaya pencegahan konflik. Masyarakat yang terlibat dalam Forum ini mewakili banyak unsur masyarakat yang ada di Kota Pontianak. Bentuk partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan dalam forum musyawarah yang kemudian dituangkan dalam daftar kebutuhan, yang terkadang tidak semua bisa terealisasikan. Berbagai kemungkinan terjadi karena kurangnya informasi, tidak masuk dalam skala prioritas daerah, keterbatasan anggaran, atau kemungkinan lainnya (Sulistiyo, 2019).

Maka dari itu, dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tokoh masyarakat yang dianggap mampu dan dipercaya sebagai perpanjangan tangan oleh masyarakat untuk berinteraksi atau menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dilibatkan dan diutus secara resmi oleh Pemerintah Kota Pontianak melalui Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 509 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pontianak Periode 2024-2028. Sejauh ini terdapat beberapa kendala yang di hadapi oleh masyarakat yang tergabung anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pontianak, yaitu rawannya penyebaran informasi hoaks di media sosial yang belum dapat di antisipasi cepat oleh Tokoh Masyarakat, penyebaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut dapat menggiring opini masyarakat lainnya terhadap isu yang beredar, kemudian adanya

keterbatasan jumlah anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang tidak sebanding dengan luas cakupan wilayah kerja, perlu adanya tambahan anggota yang melekat dalam tiap kecamatan di Kota Pontianak.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari lima penelitian terdahulu yang relevan untuk melihat partisipasi masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang menjadi mitra kerja pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, maupun konflik terlebih saat berlangsungnya Pilkada. Penelitian oleh (Agustina & Mulyadi, 2020) yang berjudul Analisis Strategi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) atas Cegah Dini dalam Penanganan Konflik Sosial di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 menggunakan metode penelitian analisis SWOT dengan pendekatan kualitatif, menggambarkan bahwa FKDM memiliki strategi dalam upaya pencegahan konflik yaitu dengan mengintegrasikan *early warning system*, melakukan dialog persuasif dengan masyarakat serta mendukung pendanaan organisasi.

Penelitian kedua oleh (Ashariadi, 2020) dengan judul Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pendidikan politik di Kabupaten Cirebon Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon memiliki dua faktor hambatan yaitu hambatan teknis (kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang perlu ditingkatkan) dan hambatan non-teknis (memerlukan penyusunan rencana strategis dan adanya keterbatasan anggaran).

Selanjutnya, penelitian oleh (Andriyani et al., 2023) dengan judul Sinergitas Pemerintah Lokal dan Komunitas dalam Penyiapan Pencegahan Konflik Horisontal di Wilayah Rawan Konflik, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa faktor penyebab konflik horisontal yaitu adanya konflik internal parpol, dimana ketidaksiapan parpol untuk menerima kekalahan menjadi pemicu. Selain itu, kepentingan organisasi masyarakat, media, buzzer, dan lembaga survei yang tidak bertanggungjawab isu yang muncul dalam proses Pemilu, seperti pendidikan politik yang kurang memadai. Serta tingkat kesiapan pemerintah lokal dalam mencegah dan menangani konflik di masyarakat sangat memengaruhi kondisi stabilitas sosial.

Penelitian oleh (Del Piero Lami, 2023) dengan judul penelitian Peran Badan Kesbangpol dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Ngada dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, menyimpulkan bahwa Bakesbangpol Kabupaten Ngada telah menunjukkan konsisten dalam menjalankan perannya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Langkah ini diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan seperti pelaksanaan sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat, kegiatan verifikasi hibah bantuan partai politik serta kegiatan lain. Namun, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, termasuk pandemi Covid-19, keterbatasan SDM dan keuangan, serta pandangan masyarakat yang menganggap politik tidak penting. Bakesbangpol Kab. Ngada menjalin kerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan pihak kepolisian setempat untuk memastikan kelancaran proses Pemilu. Mereka melaksanakan program pendidikan politik yang menyeluruh bagi masyarakat Kabupaten Ngada, sehingga informasi dan pemahaman mengenai pentingnya partisipasi politik dapat tersebar merata.

Penelitian (Fadillah, 2023) berjudul Peran Kesbangpol Kota Banda Aceh dalam Upaya Kewaspadaan Dini Konflik dengan metode penelitian kualitatif. Menemukan hasil bahwa peran pemerintah dalam kewaspadaan dini diimplementasikan melalui berbagai program yang bertujuan untuk meminimalkan potensi terjadinya konflik. Salah satunya dengan membentuk program pendeteksian dan pencegahan dini di masyarakat. Badan Kesbangpol Kota Banda

Aceh bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat serta perangkat daerah kota dalam melakukan upaya preventif guna mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul dari konflik. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala yaitu keterbatasan dalam hal pembiayaan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, beberapa perbedaan yang ada dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu, penelitian oleh (Agustina & Mulyadi, 2020) di Provinsi DKI Jakarta, penelitian (Ashariadi, 2020) bertempat di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, penelitian (Andriyani et al., 2023) yang membahas tentang penanganan konflik di daerah rawan konflik, kemudian penelitian oleh (Del Piero Lami, 2023) di Kabupaten Ngada, dan yang terakhir penelitian oleh (Fadillah, 2023) bertempat di Kota Banda Aceh. Salah satu dari penelitian tersebut memiliki jenis metode yang berbeda dari keempat penelitian lainnya.

Penelitian oleh Ashariadi, Andriyani, Del Piero Lami, dan Fadillah menggunakan metodologi jenis deskriptif kualitatif, hasil dari penelitian ini berusaha untuk menjelaskan secara rinci mengenai keadaan yang ada di lapangan sedangkan penelitian Agustina dan Mulyadi menggunakan analisis SWOT dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena membahas keterlibatan tokoh masyarakat sebagai mitra dialog pemerintah kepada masyarakat dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat terlebih dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Pontianak. Selain itu, dari segi tempat, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan yang berusaha mengadakan penelitian ke lokasi secara langsung dengan maksud memperoleh data-data yang akurat, dan lebih lengkap. Diharapkan dari kelima penelitian terdahulu di atas dapat menjadi bahan referensi yang membantu dan memudahkan penulis dalam penelitian yang dilakukan.

1.5 Tujuan

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana partisipasi tokoh masyarakat melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Pilkada 2024 di Kota Pontianak, untuk kemudian selanjutnya mengetahui faktor penghambat partisipasi tokoh masyarakat sebagai anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Pilkada 2024 di Kota Pontianak.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017).

Menurut (Wulandari et al., 2025) penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi secara mendalam dan menyeluruh mengenai permasalahan atau objek yang diteliti, kemudian dideskripsikan dan dianalisis berdasarkan teori yang relevan. Metode deskriptif dalam penelitian ini menyajikan sebuah penjelasan dalam bentuk uraian terhadap kondisi fakta tanpa adanya rekayasa. Pendekatan induktif dalam penelitian ini dengan melakukan pendekatan yang dimulai dari pengamatan terhadap fakta-fakta yang muncul di lapangan. Peneliti kemudian menganalisis fakta-fakta tersebut, merumuskan pertanyaan dan menghubungkannya dengan teori serta hukum yang relevan, sebelum akhirnya menarik kesimpulan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan induktif merupakan metode yang bertujuan untuk menggambarkan

permasalahan atau kasus berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian diteliti untuk mencari solusi dan menarik kesimpulan secara umum. Melalui pendekatan ini peneliti dapat memperoleh informasi mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk mencegah munculnya konflik sosial di tengah masyarakat selama pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Pontianak. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Informan pada penelitian terdiri dari 10 orang yaitu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pontianak, Tokoh Masyarakat (Tokoh Adat), Tokoh Masyarakat (Tokoh Agama), Tokoh Masyarakat (Tokoh Pemuda), Tokoh Masyarakat (Tokoh Akademisi), Ketua KPUD Kota Pontianak, dan Ketua Bawaslu Kota Pontianak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian terkait partisipasi masyarakat dalam badan kesatuan bangsa dan politik dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di Kota Pontianak dilakukan dengan menggunakan teori Partisipasi Masyarakat oleh Isbandi Rukminto Adi yang terdiri dari 4 dimensi dan akan digunakan untuk menggambarkan jalannya proses kolaborasi yaitu keterlibatan masyarakat dalam identifikasi potensi masalah, pemilihan atau pengambilan keputusan oleh masyarakat atas solusi masalah, upaya masyarakat mengatasi masalah melalui pelaksanaan program atau kegiatan, dan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi, adapun hasil penelitian yang telah penulis dapatkan berdasarkan hasil wawancara, dan dokumentasi di lapangan akan diuraikan berdasarkan keempat dimensi tersebut.

3.1 Masyarakat Terlibat Dalam Identifikasi Masalah

Pemerintah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi salah satu elemen penting dalam memastikan stabilitas politik di daerah Kota Pontianak dapat terjaga. Namun, tantangan politik yang bersumber dari dalam daerah dapat mengancam stabilitas politik, seperti adanya pertentangan pendapat antara masyarakat pendukung serta kekuatan politik yang berbeda-beda. Selain itu, kekuatan lawan yang hanya memperjuangkan kepentingan partainya sendiri dan mengatasnamakan rakyat juga dapat menjadi ancaman bagi stabilitas politik. Untuk mendapat data dan informasi di lapangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan berbagai mitra kerja seperti, FKDM, dan pihak keamanan seperti TNI dan Polri.

Pemerintah Kota membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pontianak sebagai wadah partisipasi masyarakat yang disahkan melalui Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 509 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pontianak Periode 2024-2028, dengan adanya surat keputusan tersebut maka kerja sama antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat memiliki landasan legalistik yang kuat sebagai acuan dalam melakukan kerja sama terkait pengumpulan data dan informasi dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Kota Pontianak.

3.2 Pemilihan atau Pengambilan Keputusan Oleh Masyarakat Atas Solusi Masalah

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang dibentuk sebagai wujud partisipasi masyarakat untuk bekerja sama dengan masyarakat dan Pemerintah Kota, dalam menjalankan tugasnya anggota FKDM akan terjun langsung menghadapi masyarakat untuk mengumpulkan data dan informasi serta bertanggung jawab memberikan laporan dan rekomendasi kepada pemerintah kota atas permasalahan ataupun rencana kegiatan dalam

rangka menyukseskan Pilkada 2024 dengan aman dan damai. Adapun cara badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak dalam merencanakan kegiatan untuk meningkatkan partisipasi tokoh masyarakat secara maksimal adalah dengan memfasilitasi kegiatan Forum dan menyediakan ruang bagi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

3.3 Upaya Masyarakat Mengatasi Masalah Melalui Pelaksanaan Program atau Kegiatan

Partisipasi masyarakat tidak cukup hanya dengan berinteraksi dengan masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya saja. Informasi dan aduan masyarakat perlu di laporkan dan dibahas dalam pertemuan suatu kegiatan, dapat berupa dialog tatap muka antar elemen pemerintah untuk menciptakan Kewaspadaan Dini. Pertemuan perlu dilakukan untuk menggabungkan berbagai pendapat dari beberapa masalah atau ancaman yang terdapat dalam masyarakat. Hal ini dapat menunjukkan sejauh mana komunikasi yang sudah dibangun antar lembaga/instansi/organisasi yang terlibat dalam jalannya proses Pilkada di Kota Pontianak. Begitu pula antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di Kota Pontianak. tokoh masyarakat yang ditunjuk sebagai anggota FKDM ini tidak dibekali dengan pelatihan khusus oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak. Namun, anggota FKDM dipilih berdasarkan popularitasnya di kalangan masyarakat dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat untuk mereka. Anggota FKDM pun menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat menggunakan kemampuan dan keahlian yang mereka miliki masing-masing.

3.4 Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Evaluasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang merasakan manfaat dari keikutsertaan tokoh masyarakat seperti Bawaslu dan KPU dalam pelaksanaan Pilkada melalui kegiatan di Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dapat dilihat bahwa informasi dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Tokoh masyarakat sebagai perwakilan yang dipercaya untuk menyampaikan pesan politik kepada masyarakat di lingkungannya secara tidak langsung turut membantu KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 di Kota Pontianak. Partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada tidak bisa dianggap remeh, karena berkat ajakan dari tokoh-tokoh masyarakat ini turut memberikan motivasi baik kepada para masyarakat dan pendukung calon kepala daerah untuk tetap harmonis dan bersaing secara sehat. Namun, dari hasil wawancara, peneliti belum mendapatkan jawaban bahwa para tokoh masyarakat diikutsertakan secara langsung dalam rapat evaluasi yang dilakukan pihak KPU, Bawaslu, maupun Pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak.

3.5 Faktor Penghambat Partisipasi Tokoh Masyarakat Sebagai Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Dalam Pilkada 2024 Di Kota Pontianak

Penyelenggaraan kewaspadaan dini di kecamatan/kelurahan di Kota Pontianak hanya beranggotakan minimal satu orang saja sehingga cukup kesulitan untuk menjalankan tugas dengan mencakup wilayah kecamatan/kelurahan yang cukup luas dan membutuhkan kerja sama dengan pihak berwenang lainnya. Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menemukan beberapa fakta terkait hal-hal yang dapat menghambat jalannya kewaspadaan dini di kota Pontianak, yaitu rawannya terjadi penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks di tengah lingkungan masyarakat melalui media sosial. Informasi yang tidak valid ini sering kali disebar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, baik dengan tujuan bercanda, mencari perhatian, maupun sebagai hiburan semata, terutama di momen-momen sensitif seperti masa Pilkada. Tugas FKDM cukup luas namun ada keterbatasan jumlah

anggota yang tidak sebanding dengan luas cakupan wilayah kerja. Meskipun FKDM dibentuk sebagai representasi yang mencakup seluruh wilayah Kota Pontianak, kenyataannya tidak semua kecamatan memiliki perwakilan langsung dari FKDM. Hal ini menyebabkan kendala dalam pengumpulan data dan informasi secara menyeluruh, serta menghambat kemampuan FKDM untuk merespons setiap isu atau kejadian yang berkembang di masyarakat secara cepat dan efektif.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Partisipasi tokoh masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kota Pontianak diperlukan sebagai mitra kerja sama antara pemerintah kota dengan masyarakat. Pemerintah sendiri tidak mungkin dapat mencakup secara luas baik dalam jumlah masyarakat maupun mengenai isu-isu yang sedang terjadi dalam masyarakat. Maka keterlibatan tokoh masyarakat dalam hal ini butuh didukung dan difasilitasi oleh pemerintah. Seperti yang dibahas dalam penelitian oleh (Agustina, 2020) dalam analisisnya, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat memiliki strategi berupa *early warning system* yang merupakan integrasi sistem melibatkan berbagai pihak baik dari masyarakat maupun pihak berwajib, serta melakukan dialog persuasif antara tokoh masyarakat dengan pemerintah.

Selama menjalankan tugasnya sebagai mitra kerja pemerintah kota dalam menangani ataupun mencegah terjadinya konflik di tengah masyarakat, tokoh masyarakat juga masih mengalami hambatan yaitu terkait masalah hoaks dan perlunya ditambahkan anggota forum (tokoh masyarakat) di Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pontianak. Masalah penyebaran hoaks menjadi masalah umum yang sering terjadi, karena keterbatasan tokoh masyarakat dalam menjangkau secara luas teknologi informasi khususnya melalui media sosial. Dalam penelitian (Andriyani et al., 2023) pun menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab konflik dapat terjadi karena adanya media, *buzzer* ataupun lembaga yang tidak bertanggungjawab dalam penyebaran informasi yang dapat memicu kesalahpahaman berita atau informasi di kalangan masyarakat.

Adanya keterlibatan tokoh masyarakat diharapkan dapat meningkatkan stabilitas sosial di masyarakat khususnya Kota Pontianak. Hal tersebut diperlukan agar jalannya pemerintahan di Kota Pontianak dapat berlangsung dengan baik tidak hanya saat pelaksanaan Pilkada saja, tetapi perlu juga untuk jalannya aktivitas pemerintahan sehari-hari. Sejalan dengan penelitian oleh (Del Piero Lami, 2023) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pengawas dari FKDM turut aktif dalam pengembangan kualitas SDM dari anggota forum. Mengevaluasi kinerja forum agar tujuan terbentuknya forum dapat terlaksana dan dapat dipertanggungjawabkan kepada daerah khususnya Pemerintah Kota Pontianak. Keberhasilan tokoh masyarakat dalam berdialog dan menyampaikan pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat akan menjadi nilai baik bagi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat terlebih bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai Partisipasi Tokoh Masyarakat Melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Pilkada 2024 di Kota Pontianak, maka peneliti dapat memberi beberapa kesimpulan bahwa Peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Pontianak telah berjalan dengan baik walaupun berdasarkan hasil penelitian melalui teori Isbandi (2008) tentang Partisipasi Masyarakat, yang menjelaskan partisipasi masyarakat diukur melalui empat dimensi yaitu, partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi potensi masalah, partisipasi dalam pemilihan atau pengambilan keputusan/solusi atas suatu masalah, partisipasi masyarakat mengatasi masalah melalui pelaksanaan program atau kegiatan, dan partisipasi

masyarakat dalam proses evaluasi, diketahui bahwa 3 (tiga) dari 4 (empat) dimensi telah berlangsung dengan baik dan optimal, sementara dimensi terakhir yaitu partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi belum berjalan dengan baik. Partisipasi tokoh masyarakat terbukti dapat membantu dan memperkuat kerja sama antara berbagai pihak, seperti masyarakat, aparat keamanan, dan pemerintah daerah dalam memantau dan mengidentifikasi potensi masalah yang dapat muncul serta memberi rekomendasi kebijakan yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah daerah selama tahapan Pilkada yang berlangsung di Kota Pontianak.

Keterbatasan penelitian. Terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhi jalannya penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Kota Pontianak, antara lain, Penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks melalui media sosial menjadi tantangan bagi anggota FKDM. Informasi-informasi yang tidak tervalidasi sering kali disebarkan oleh individu atau kelompok yang tidak bertanggung jawab, dengan beragam motif seperti bercanda, mencari perhatian, ataupun sekadar hiburan, terutama dalam suasana yang rawan seperti masa Pilkada. Seperti yang dikutip dari (Younus et al., 2025) tentang “*Smart Voter*” & “*Smart Citizens*” menjelaskan bahwa untuk menuju “*Smart Voter*” & “*Smart Citizens*”, maka para pembuat kebijakan (pemerintah) dan penyelenggara pemilu perlu mengembangkan infrastruktur digital yang aman dengan memprioritaskan perlindungan data pemilih, akses teknologi yang setara, dan pedoman yang jelas untuk menjaga integritas informasi. Penyebaran hoaks yang ada dapat berpotensi menimbulkan keresahan sosial dan dapat memengaruhi situasi di tengah masyarakat, hal tersebut menjadi tantangan FKDM dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik. Teknologi telah menjadi bagian yang melekat dengan kehidupan masyarakat. Namun, sependapat dengan (Goñi, 2025) yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dan solusi teknis dapat berperan sebagai masalah atau solusi, tergantung pada kerangka pemikiran di mana keduanya digunakan. Selain itu, faktor penghambat lainnya ialah adanya keterbatasan jumlah anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) juga menjadi hambatan signifikan. FKDM Kota Pontianak memiliki cakupan kerja yang cukup luas, namun tidak seluruh kecamatan memiliki perwakilan langsung dari forum ini. Kondisi ini berdampak pada kurang maksimalnya pengumpulan data dan informasi, serta keterbatasan dalam menjangkau isu-isu aktual yang berkembang di masyarakat secara cepat dan menyeluruh. FKDM harus bekerja ekstra dengan mengandalkan keaktifan internal dan pelaporan dari masyarakat, yang tentu belum mampu menciptakan sistem kewaspadaan dini yang ideal dan responsif.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Berdasarkan hasil penelitian terhadap kondisi yang terjadi di lapangan terkait partisipasi tokoh masyarakat melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Pilkada 2024 di Kota Pontianak, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan sebagai bahan pertimbangan bagi instansi terkait, antara lain, partisipasi masyarakat dalam mengikuti proses evaluasi pelaksanaan kegiatan perlu dilibatkan agar tokoh masyarakat secara langsung menerima apresiasi maupun kritik dari pihak penerima manfaat. Selanjutnya kritik dan saran tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pengurus FKDM dalam menjalankan tugas-tugas di tengah masyarakat. FKDM dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak harus lebih aktif untuk membentuk akun media sosial dan juga memberdayakan sumber daya anggota dari kaum anak muda atau merangkul organisasi kemahasiswaan untuk membantu penyebarluasan informasi dan himbauan terkait kewaspadaan dini terlebih menjelang Pilkada di Kota Pontianak. Dengan demikian, proses penyebaran dan pengumpulan informasi seperti aduan masyarakat maupun himbauan dapat berjalan lebih optimal dan efisien. Pemerintah kota juga perlu mempertimbangkan untuk menambah jumlah anggota FKDM, atau dengan cara lain seperti menjalin kerja sama yang

lebih erat dengan tokoh masyarakat, RT/RW, serta lembaga lokal lainnya guna memperluas jaringan informasi di lapangan. Kerja sama ini akan membantu FKDM menjangkau informasi lebih cepat dan akurat, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem kewaspadaan dini serta setiap kecamatan di Kota Pontianak memiliki perwakilan yang aktif dan terkoordinasi.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penguji yang telah memberi arahan serta masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada Pemerintah Kota Pontianak, seluruh informan penelitian yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis terkait penelitian selama pelaksanaan wawancara, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian. Terima kasih.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D., & Mulyadi, E. (2020). Analisis Strategi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) atas Cegah Dini dalam Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2019. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(2), 205–209. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i2.1226>
https://www.researchgate.net/publication/349908092_Analisis_Strategi_Forum_Kewaspadaan_Dini_Masyarakat_FKDM_atas_Cegah_Dini_dalam_Penanganan_Konflik_Sosial_di_Provinsi_Dki_Jakarta_Tahun_2019
- Andriyani, L., Wijayanti, H., & Nasih, M. (2023). Sinergitas Pemerintah Lokal, Elit Lokal dan Komunitas dalam Penyiapan Pencegahan Konflik Horizontal di Wilayah Rawan Konflik. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 4(1), 50–61. <https://doi.org/10.24853/independen.4.1.50->
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/Independen/article/view/16959>
- Ashariadi, I. A. (2020). Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik Di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, 12–26. <http://eprints.ipdn.ac.id/6207/>
- Del Piero Lami, P. (2023). *Peran Badan Kesbangpol Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Ngada*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. <http://eprints.ipdn.ac.id/15045/>
- Fadillah, A. (2023). Peran Kesbangpol Kota Banda Aceh Dalam Upaya Keswaspadaan Dini Konflik. In *Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/34681/1/Aris%20Fadillah%2C%20190802099%2C%20FISIP%2C%20IAN.pdf>
- Goñi, J. (2025). Citizen participation and technology: lessons from the fields of deliberative democracy and science and technology studies. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 1–13. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04606-4>
<https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-86000111019&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&s=TITLE-ABS-KEY%28participation+politics%29>
- Kamal, M. (2013). Pendidikan Multikultural Bagi Masyarakat Indonesia Yang Majemuk. *Al-Ta Lim Journal*, 20(3), 451–458. <https://doi.org/10.15548/jt.v20i3.42>
<https://doi.org/10.15548/Jt.V20i3.42> <https://www.mendeley.com/catalogue/5bd32a35-26ba-34a7-8a84-c2e6f625327a/>

- Koubar, S. H., & Haji, M. (2025). The Crisis of Dual Recognition in The American Granddaughter: A Honnethian Framework Study. *International Journal of Literary Humanities*, 23(4), 147–166. <https://doi.org/10.18848/2327-7912/CGP/v23i04/147-166>
<https://cgscholar.com/bookstore/works/the-crisis-of-dual-recognition-in-the-american-granddaughter>
- Sulistiyo, H. (2019). Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 4(2), 75–82.
<https://ejournal.ipdn.ac.id/JPDPP/article/view/852>
- Supandi, D., Wasistion, S., Madjid, U., & Pitono, A. (2023). Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3731–3758. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2697>
<https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/2697/1161>
- Wulandari, O., Pitono, A., & Ali, H. (2025). Kualitas Pelayanan Izin Mendirikanbangunan Rumah Tinggaluntuk Mewujudkan Perlindunganhukum Masyarakatpada Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintukota Administrasi Jakarta Timur. *Kualitas Pelayanan Izin Mendirikanbangunan Rumah Tinggaluntuk Mewujudkan Perlindunganhukum Masyarakatpada Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintukota Administrasi Jakarta Timur*, 11, 1–14.
<https://journal.uir.ac.id/index.php/JKP/article/view/20959/7565>
- Younus, M., Mutiarin, D., Abdul Manaf, H., Nurmandi, A., & Luhur Prianto, A. (2025). Conceptualizing smart citizen as smart voter and its relationships with smart election process. *Discover Global Society*, 3(1). <https://doi.org/10.1007/s44282-025-00148-x>
<https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0105000851303&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&s=TITLE-ABSKEY%28election+participation%29&sessionSearchId=29dc559c343ca61d7169d715fa4265db>